



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 02 Maret 2018

Halaman: 2

BANTUAN DANA DISTOP

Pengurus Kampung Wisata Resah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pengurus kampung wisata resah dengan kabar tidak adanya bantuan dana dari pemerintah untuk mendukung kegiatan, seperti gelaran budaya yang selama ini rutin diadakan tiap tahun. Pengurus kampung wisata berharap ada kejelasan mengenai hal itu.

"Kami mendapat info tahun ini tidak ada bantuan dana itu dari pegawai Dinas Pariwisata dan forum komunikasi kampung wisata. Masyarakat mulai gelisah dengan tidak adanya dukungan anggaran dari pemkot," kata Ketua Kampung Wisata Pandeyan Bayu Pintaka, saat beraudiensi di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (1/3).

Dia menjelaskan bantuan dana dari pemerintah penting untuk mendukung kegiatan kampung wisata. Di Kampung Wisata Pandeyan bantuan dana dibutuhkan untuk mendukung kegiatan atraksi budaya Bakda Kupat yang diadakan seminggu setelah lebaran. Sejak Bakda Kupat diadakan pertama di 2010, lanjutnya, mendapatkan bantuan dana untuk mendukung kegiatan itu hingga berlangsung sampai tahun 2017.

"Bantuan dana dari pemkot selama ini mendukung sebagian kebutuhan dana untuk kegiatan Bakda Kupat. Tahun 2017 ada bantuan sekitar Rp 30 juta untuk dan sebagian swadaya masyarakat. Kalau tahun ini semua swadaya urunan warga, juga berat," tuturnya.

Menurutnya kekhawatiran tidak adanya bantuan dana untuk mendukung kampung wisata juga dirasakan oleh kampung wisata lainnya di Kota Yogyakarta. Kampung Wisata Pandeyan sudah berupaya membentuk sanggar seni budaya yang berakta. Tapi dinilai belum menjadi badan hukum untuk memenuhi aturan menerima bantuan hibah.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko yang menemui warga menyampaikan, dewan lewat komisi akan melakukan klarifikasi ke dinas terkait. Dia menduga ada pergeseran anggaran kampung wisata karena pecahnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Mengingat sebagian kampung wisata juga menggunkan potensi budaya atau menjadi kampung budaya.

"Secara logika sebagian besar kampung wisata di Yogyakarta adalah kampung budaya tapi dikemas menjadi tujuan wisata. Makanya butuh koordinasi dua dinas itu. Kalau tidak dianggarkan lucu, pemkot berkomitmen mendukung kegiatan kampung-kampung budaya," terang Koko.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko menambahkan, sebagian masyarakat masih mengetahui Dinpar dan Dinbud masih menjadi satu. Ditegaskan, seluruh kampung wisata di Kota Yogyakarta sudah ditetapkan melalui surat keputusan walikota, sehingga harus ada kejelasan dukungan dari pemkot.

Secara terpisah Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan, dinasny kini sudah tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana. Bantuan yang diberikan dalam bentuk program dan fasilitasi kegiatan. Beberapa kegiatan kampung wisata seperti atraksi budaya dan festival kampung wisata selama ini diklaim ada dukungan tapi bukan dalam bentuk dana.

"Dukungan modelnya program dan fasilitasi kegiatan. Tapi memang tidak keseluruhan difasilitasi. Jika kegiatan kampung wisata seperti Bakda Kupat harus dikomunikasikan ke kami nanti akan dilihat bentuk fasilitasi apa yang bisa kami lakukan," tandas Yetti.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Din. Pariwisata</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Se
2. <i>Din. Kebudayaan</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005